



Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan SPBE Di Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap

Eva Charena Aditiya¹, Otong Husni Taufiq², Arie Budiawan³

Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Jalan R.E. Martadinata No. 150, Ciamis.

E-mail : evacharenaaditiya03@student.unigal.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the Role of Village Government in public services through the implementation of SPBE in Panulisan Timur Village, Dayeuhluhur District, Cilacap Regency, which has been implemented but has not been optimal with the problems found, namely weak regulations regarding SPBE, lack of socialization resulting in a lack of community participation, and lack of training for village officials resulting in obstacles in providing services through SPBE to the community. The purpose of this study is to determine how the Role of Village Government in Public Services through the implementation of SPBE in Panulisan Timur Village. This study uses a qualitative approach with a total of 9 informants. The data collection techniques are through structured interviews, participant observation and documentation. Based on the results of the study, it is known that the role of village government in public services through SPBE is not in accordance with the theory of the role of government in the public sector according to Jones in Mahsun (2013: 6). This can be seen from the 9 indicators, there are 3 indicators that have not been running optimally. The obstacles that occur include the lack of operational guidelines and technical guidelines that specifically regulate the implementation of SPBE. Then there is the lack of mass socialization to the village community, and the lack of special training that is evenly distributed and has not reached all village officials and communities that focus on the implementation of SPBE at the village level. To overcome these obstacles, the Village Government is expected to be able to compile and establish implementation instructions (juklak) and technical instructions (juknis) that specifically regulate the implementation of SPBE at the village level so that its implementation can run uniformly and effectively. Then the Village Government in providing Socialization is not only done to community institutions, but also to the general public so that they understand the benefits, objectives, and procedures for using electronic-based services provided by the village government. And the Village Government holds regular training and mentoring for all village officials and communities related to the use of SPBE services.*

Keywords: *Role, Village Government, SPBE*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi Peran Peran Pemerintah Desa dalam pelayanan publik melalui penerapan SPBE di Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap yang sudah dilaksanakan namun belum optimal dengan masalah yang ditemukan yaitu lemahnya aturan mengenai SPBE, kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pelatihan kepada perangkat desa yang mengakibatkan adanya hambatan dalam pemberian pelayanan melalui SPBE kepada masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik melalui penerapan SPBE di Desa Panulisan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi partisipasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam pelayanan public melalui SPBE belum sesuai dengan teori peran pemerintah dalam sektor public menurut Jones dalam Mahsun (2013:6). Hal tersebut terlihat dari 9 indikator, terdapat 3 indikator yang belum berjalan optimal. Adapun hambatan yang terjadi antara lain yaitu masih belum tersedianya juklak dan juknis yang secara khusus mengatur implementasi SPBE Kemudian belum adanya sosialisasi secara massif kepada Masyarakat desa, dan belum adanya pelatihan secara khusus yang merata dan belum menjangkau seluruh perangkat desa dan masyarakat yang berfokus pada penerapan SPBE di tingkat desa. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Desa diharapkan dapat menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan SPBE di tingkat desa sehingga dalam penerapannya dapat berjalan dengan seragam dan efektif. Kemudian pemerintah Desa dalam memberikan Sosialisasi tidak

hanya dilakukan kepada lembaga kemasyarakatan, tetapi juga kepada masyarakat umum agar mereka memahami manfaat, tujuan, serta tata cara penggunaan layanan berbasis elektronik yang disediakan oleh pemerintah desa. Serta Pemerintah Desa menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan secara berkala bagi seluruh perangkat desa serta masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan layanan SPBE.

Kata Kunci: Peran; Pemerintah Desa; SPBE.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Mahakrisna Giri Prawira (2023:83) Peran sistem pemerintah berbasis elektronik dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik juga tidak terbatas pada aspek fisik dan efisiensi semata. Sistem ini juga membawa manfaat tambahan, seperti peningkatan transparansi, partisipasi publik yang lebih aktif, dan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, dan anggaran pemerintah melalui portal pemerintah elektronik. Meskipun sistem pemerintah berbasis elektronik menawarkan banyak potensi dan manfaat, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, ketersediaan saluran internet yang tersebar rata di hampir seluruh penjuru wilayah Indonesia masih menjadi kendala dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan publik secara online.

Selain itu, literasi digital yang rendah di beberapa daerah juga mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem ini oleh masyarakat. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik di Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan desa. Desa Panulisan Timur, yang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Dayeuhluhur dengan sejarah panjang dan wilayah yang cukup luas, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan responsif kepada masyarakat.

Desa Panulisan Timur adalah salah satu desa di Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 17.640 km². Secara administratif, wilayah Desa Panulisan Timur terdiri dari 4 (empat) Dusun, 13 (tiga belas) Rukun Warga, dan 48 (empat puluh delapan) Rukun Tetangga. Berdasarkan hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs Desa tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panulisan Timur, yang merujuk pada Permendes PDPTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kecamatan Dayeuhluhur memiliki cukup banyak desa, tetapi tidak semuanya memiliki website aktif atau terindeks Google. Beberapa desa ada menggunakan domain alternatif (subdomain kabupaten) sehingga bukan website resmi. Desa Panulisan Timur ini ternyata sistem pemerintah berbasis elektronik ini belum sepenuhnya diterapkan. Tentunya, fenomena ini merupakan hal yang cukup serius untuk segera disikapi, karena kita tahu jika sistem pemerintah yang masih cenderung manual dapat menimbulkan berbagai masalah, diantaranya seperti pelayanan publik cenderung lambat dan kurang efisien.

Penerapan SPBE di Desa Panulisan Timur bertujuan untuk menjawab dinamika perubahan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang modern, efektif, dan akuntabel. Berdasarkan penjabaran awal di Desa Panulisan Timur sendiri Program SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) sudah berjalan namun diketahui bahwa peran Pemerintah Desa dalam penerapannya masih belum optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224) menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan menurut Hanafie (2016:165-166), peranan adalah tindakan-tindakan seseorang yang melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya. Peran mencakup norma-norma yang memandu cara individu bertindak dan berinteraksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai rancangan mengenai apa yang harus dilakukan, serta merupakan perilaku penting yang menjaga dan memengaruhi kelangsungan struktur sosial secara keseluruhan. Dengan demikian peran adalah jembatan yang mengubah posisi pasif menjadi tindakan sosial aktif.

Menurut Soekanto (2017:213), mengungkapkan bahwa: “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki.

Menurut Jones dalam Mahsun, Firma Sulistyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha (2013:6) peran utama pemerintah dalam pengelolaan sektor publik mencakup tiga hal, yaitu *regulatory role*, *enabling role* dan *direct provision of goods and services* :

1. *Regulatory Role*
Regulatory Role adalah peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat. Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara bersama-sama bisa mengkonsumsi dan menggunakan *public goods*.
2. *Enabling Role*
Enabling Role adalah peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah. Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar.
3. *Direct Provision of Goods and Services*
Direct Provision of Goods and Services adalah peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (*pure public goods*) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta. Makna *pure public goods* ternyata dalam prakteknya sulit untuk dipisahkan secara tegas dengan *quasi public goods*.

Menurut Arifin (2018:6) “Desa adalah wilayah terkecil yang ada di Indonesia yang diberi hak otonomi desa sendiri oleh pemerintah”. Hal ini berarti desa diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk kelangsungan pemerintahan. Tiap desa dapat mengembangkan potensi untuk keberlangsungan pemerintahan serta mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing akan tetapi dalam mengurus rumah tangganya secara mandiri desa tidak menerima pengaruh dari luar secara berlebihan.

Menurut Gultom et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik melalui *e-government* berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi internal organisasi sektor publik, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kompetensi SDM. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan publik melalui *e-government* adalah upaya pemerintah untuk memindahkan penyelenggaraan layanan ke sistem digital elektronik. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir sebagai inisiatif nasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Sinergi antara SPBE sebagai kerangka kerja tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagai sistem informasi operasional memiliki potensi besar dalam mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik Rustandi (2023).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi warga negara mengenai barang, fasilitas, atau ketentuan manajerial. Dalam konteks modernisasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka kerja nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui digitalisasi layanan dan penyediaan akses *online*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam terkait Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan SPBE Di Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Menurut Sugiono (2016:205) bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Sumber data diperoleh dari 9 informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan SPBE Di Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap

didasarkan pada indikator peran pemerintah dalam sektor publik menurut Jones dalam Mahsun (2013:6) dengan indikator yaitu : *Regulatory Role, Enabling Role Dan Direct Provision Of Goods And Services.*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah inisiatif pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperbaiki kualitas layanan publik serta pengelolaan pemerintahan. Melalui penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang optimal, pemerintah dapat beroperasi dengan lebih efektif, efisien, transparan, serta dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Panulisan Timur berfungsi sebagai pelaksana utama dalam menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) melalui digitalisasi administrasi desa, pengelolaan data masyarakat, dan penyediaan layanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses. Dengan menggunakan teknologi informasi, pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi dalam penulisan surat, pengelolaan data penduduk, pencatatan bantuan sosial, dan penyampaian informasi kepada warga.

Salah satu langkah implementasi SPBE yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panulisan Timur adalah adanya program administrasi dan pelayanan big data pemerintah desa yang bisa diakses oleh seluruh perangkat desa melalui aplikasi SID (Sistem Informasi Desa). Melalui SID, pemerintah desa mampu mengelola data penduduk secara terintegrasi, mempercepat pelayanan administrasi seperti pembuatan dokumen, serta memudahkan penyusunan laporan dan perencanaan pembangunan yang berbasis data. Selanjutnya dibuat layanan pengaduan dan data kependudukan dalam bentuk tautan yang bisa diakses oleh publik. Dibuatnya link berfungsi sebagai sarana dan media yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan laporan serta juga dijadikan sebagai sistem pelayanan.

Keberhasilan pemerintah desa dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya terlihat dari adanya teknologi atau layanan digital, tetapi juga dari seberapa jauh pemerintah desa bisa melaksanakan fungsinya secara efektif dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut, penulis menggunakan teori Peran utama pemerintah dalam

pengelolaan sektor publik menurut Jones dalam Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha (2013:6), *Regulatory Role, Enabling Role dan Direct Provision of Goods and Services*.

A. Regulatory Role

Hasil penelitian pada dimensi Regulatory Role dilihat dari tiga indikator yang diukur menunjukkan sudah cukup optimal. Hal ini dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa dua dari tiga indikator yang sudah terpenuhi dimana penerapan SPBE sudah mulai berjalan dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah desa telah memahami pentingnya digitalisasi pelayanan serta berupaya menyesuaikan penerapan SPBE dengan regulasi dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari penggunaan layanan online seperti aplikasi SID, website desa, dan Google Form untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Uraian di atas sejalan dengan yang disampaikan Kuncoro, (2004:113) bahwa pemerintah dapat bertindak sebagai koordinaator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan dimana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat.

Berdasarkan teori diatas bahwa Regulatori Role merupakan salah satu dimensi dalam organisasi sektor publik yang berperan untuk menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, secara sederhananya fungsi regulatory role adalah mengatur, mengawasi, dan menindak agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Karena tanpa aturan maka ketimpangan, ketidakadilan dan penurunan kualitas hidup akan terjadi dalam masyarakat.

Hambatan yang ditemukan dilapangan terkait yaitu masyarakat belum bisa berpartisipasi sepenuhnya dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Hal ini dikarenakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa masih lemah. Kemudian juklak dan juknis yang digunakan masih berupa acuan belum dibentuk secara khusus. sehingga berdampak pada kurangnya rasa kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pelayanan melalui elektronik. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu, pemerintah desa melakukan sosialisasi

kepada lembaga kemasyarakatan. Sosialisasi itu sendiri berisi tentang edukasi dan praktek tentang bagaimana jalannya program penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Hal tersebut diharapkan menjadi pendorong bagi masyarakat, pemerintah desa terus mengenalkan program penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) serta mencantumkan aturan secara khusus atau peraturan Bupati tentang penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Desa Panulisan Timur.

B. Enabling Role

Hasil penelitian pada dimensi Enabling Role dilihat dari tiga indikator yang diukur menunjukkan sudah cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan dua dari tiga indikator penelitian yang sudah terpenuhi, dimana tersedianya data desa yang telah dikelola secara terintegrasi dan berbasis teknologi sehingga mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran data melalui RT/RW maupun formulir daring. Selain itu, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi, edukasi, dan pelibatan lembaga kemasyarakatan dalam penyebaran informasi terkait SPBE. Meskipun efektivitas implementasi SPBE masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar partisipasi publik dalam pemanfaatan layanan digital dapat berjalan lebih optimal.

Peran sektor publik sangat penting dalam menjamin terlaksananya program yang sudah ditetapkan dalam aturan dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukan masyarakat. Menurut Ndaraha (2010:45) bahwa peran pemerintah yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Berdasarkan uraian teori diatas bahwa pemerintah Desa tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Sehingga apa yang dijadikan sebagai tujuan dalam pembangunan tersebut dapat dicapai dengan maksimal.

Hambatan yang ditemukan pada implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Desa Panulisan Timur yaitu masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara rutin, sehingga penyampaian informasi mengenai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Panulisan Timur melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menyisipkan materi sosialisasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) yang dilaksanakan secara berkala serta melibatkan RT, RW, dan lembaga kemasyarakatan sebagai perantara penyebaran informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa juga memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem informasi desa dan formulir daring, untuk mendukung pengelolaan serta pembaruan data secara lebih efektif.

C. *Direct Provision of Goods and Services.*

Hasil penelitian pada dimensi *Direct Provision of Goods and Service* dilihat dari tiga indikator yang diukur menunjukkan sudah cukup optimal. Kondisi ini ditunjukkan oleh dua dari tiga indikator yang terpenuhi dimana adanya upaya pemerintah desa dalam menyediakan sarana pendukung pelayanan berbasis elektronik, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, serta mendukung peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan pemberian pelatihan dalam pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Desa Panulisan Timur. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemberian pelatihan dalam pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Desa Panulisan Timur dapat berjalan secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman serta keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan pelayanan berbasis elektronik.

Peran sektor publik adalah ikut mengendalikan atau mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa publik dan regulasi yang telah ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat. Kadarisman, (2013:172) mengemukakan bahwa kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in*

control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan teori diatas bahwa *direct provision of goods and services* merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan (*controlling*) yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kebijakan. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan baik secara efektif maupun efisien.

Pemerintah Desa telah menunjukkan perannya dalam menyediakan layanan dan fasilitas pendukung pemberian pelatihan dalam pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) kepada masyarakat. Namun, agar tujuan pelayanan publik yang berkualitas dapat tercapai secara maksimal, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses layanan, serta penguatan dukungan terhadap pelaksanaan pemberian pelatihan dalam pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Adapun hambatan yang dihadapi seperti adanya keterbatasan anggaran untuk mendukung pengembangan program dan fasilitas pemberian pelatihan dalam pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Desa Panulisan Timur, belum meratanya kemampuan aparatur desa dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta masih terbatasnya pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai layanan berbasis elektronik. Selain itu, beberapa fasilitas pendukung pemberian pelatihan dalam pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Desa Panulisan Timur masih memerlukan pengembangan agar dapat menunjang pelayanan secara lebih optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa melakukan berbagai upaya seperti mengalokasikan anggaran sesuai kemampuan desa, mengikutsertakan aparatur desa dalam pelatihan, diklat, dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan, serta terus berupaya melengkapi dan meningkatkan sarana prasarana pendukung guna mendukung

efektivitas penerapan pemberian pelatihan dalam pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Desa Panulisan Timur.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Desa Panulisan Timur telah berjalan cukup optimal. Hal ini terlihat dari pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID), website desa, serta layanan berbasis daring yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pada dimensi *Regulatory Role*, *Enabling Role*, dan *Direct Provision of Goods and Services*, pemerintah desa telah melaksanakan perannya dengan cukup baik dalam mendukung digitalisasi pelayanan dan pengelolaan data desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti lemahnya regulasi khusus SPBE, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum meratanya kemampuan teknologi informasi di kalangan aparatur desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *e-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: BPF.
- Ndraha, Taliziduhu, (2010). *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho. (2003). *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Rustandi. (2023). *Digitalisasi Governance*. Makasar: Penerbit CV. Ayrada Mandiri

- Samsu. (2017). *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development*. In Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sarwono, Sarlito w. 2015. *Teori Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2008). *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Siagian, Sondang. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian pendidikan edisi Pertama*.Tanggerang: Prenada Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta,Bandung.
- Sugoyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal - jurnal

- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71-95.
- JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 23, Nomor 1, April 2025: 53-63e- ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
- Lukow, S. (2015). Eksistensi Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Manado. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 130-142.
- Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata*.
- Subroto, S. (2018) ‘Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan.’” Optimal”’. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 12
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.